

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang terdapat pada bab 4, maka dapat disimpulkan:

1. Alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang paling efisien bagi beban usaha PT INTI adalah alternatif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung oleh para pekerja PT INTI. Alternatif ini memungkinkan PT INTI untuk menghemat beban usahanya dengan nominal terbesar, hal tersebut disebabkan oleh karena PT INTI tidak perlu mengeluarkan lagi beban PPh pasal 21 untuk para pegawainya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perhitungan sampel PPh pasal 21 dari 50 orang pegawai PT INTI pada divisi JTS bahwa jumlah biaya fiskal alternatif pertama ini paling kecil diantara keempat alternatif perhitungan lainnya (Rp 3.149.906.919,00), selain itu selisih biaya fiskal dengan biaya komersialnya juga Rp 0,00.

Gaji para pegawai PT INTI langsung dipotong oleh perusahaan tiap bulannya untuk membayar PPh pasal 21 dibayar dimuka. Tetapi dampaknya bagi karyawan adalah *take home pay* mereka dari alternatif ini juga terkecil dibanding keempat alternatif lainnya (Rp 194.121.172,00). Jadi

alternatif pertama ini paling menguntungkan bagi perusahaan (PT INTI), namun paling merugikan para pegawainya.

2. Alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang menghasilkan *take home pay* (gaji yang dibawa pulang) bagi karyawan PT INTI yang paling besar adalah alternatif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (PT INTI) sebagai bentuk kenikmatan bagi para pegawainya.

Alternatif ini merupakan alternatif yang digunakan PT INTI untuk menghitung PPh pasal 21-Gaji karyawannya untuk tahun pajak 2006. Alternatif kedua ini menghasilkan selisih biaya komersial dan biaya fiskal terbesar dibanding keempat alternatif yang lainnya (Rp 194.121.172,00). Selisih tersebut muncul sebagai akibat peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan laporan keuangan fiskal memasukan beban PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebagai biaya. Hal tersebut diatur dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1e, “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari PKP.”

Tetapi bagi karyawan PT INTI alternatif ini menghasilkan jumlah yang lebih besar bila dibandingkan dengan alternatif kesatu dan alternatif ketiga (Rp 3.149.906.919,00), hal tersebut dikarenakan *take home pay* mereka tidak dipotong PPh pasal 21 terutang. Semua beban PPh pasal 21 pada alternatif ini ditanggung oleh PT INTI. Jadi alternatif kedua ini paling menguntungkan bagi para pegawai, namun paling merugikan bagi

perusahaan (PT INTI) karena PT INTI tidak dapat mengurangi beban Pajak Penghasilan yang harus disetorkannya kepada negara.

3. Alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang tidak saja efisien bagi beban usaha PT INTI, tetapi juga menghasilkan *take home pay* (gaji yang dibawa pulang) bagi karyawan yang cukup besar adalah alternatif perhitungan dengan cara PT INTI memberikan tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus *gross-up* kepada para pegawainya.

Alternatif ini paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi PT INTI, perusahaan dapat mengurangi seluruh beban PPh pasal 21 para pegawainya dikarenakan diizinkan pembiayaan tunjangan pajak dalam laporan laba/rugi fiskal perusahaan. Sedangkan bagi para pegawai PT INTI alternatif ini juga menguntungkan, hal itu disebabkan jumlah *take home pay* mereka juga sama sekali tidak dipotong dengan beban PPh pasal 21 yang terutang. Jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah tunjangan pajak, dalam sampel adalah sebesar Rp 230.375.108,00. Selisih antara laporan laba/rugi fiskal dengan laporan laba/rugi komersial bila digunakan alternatif keempat ini adalah Rp 0,00.

4. Pengaruh penerapan perencanaan pajak (khususnya PPh pasal 21) pada efisiensi beban usaha perusahaan (PT INTI) adalah PT INTI dapat meminimalisir beban usahanya melalui penghematan beban pajak yang harus dibayarkan oleh PT INTI kepada negara. Hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat penurunan PKP PT INTI.

Sebelum perencanaan pajak PT INTI tidak dapat membebankan biaya PPh pasal 21 para pegawainya, hal tersebut disebabkan biaya tersebut termasuk ke dalam biaya yang tidak boleh dikurangkan terhadap PKP perusahaan (UU Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat 1e). Dengan perencanaan pajak dapat dicari alternatif perhitungan lain yang paling baik bagi PT INTI dan para pegawainya. Alternatif tersebut adalah dengan cara pemberian tunjangan pajak yang dihitung dengan metode *gross-up*. Dengan alternatif tersebut PT INTI dapat membebankan biaya tunjangan para pegawainya, sedangkan bagi para pegawainya *take home pay* mereka juga tidak berkurang.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pengaruh perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dalam upaya meningkatkan efisiensi beban usaha perusahaan (PT INTI), maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT INTI sebaiknya melakukan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 sebab dapat mengurangi beban usaha perusahaan melalui penghematan beban pajak.
2. Dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang diperlukan suatu kerja sama yang optimal antara bagian akuntansi dengan bagian pajak PT INTI, sehingga dapat dicari solusi perencanaan pajak yang paling tepat.

3. Bagi pihak-pihak lain yang menaruh minat pada bidang perpajakan, penulis menyarankan agar selalu *up-to-date* dalam mengetahui peraturan-peraturan perpajakan. Dengan begitu diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak yang paling efektif terhadap kegiatan usahanya.
4. Bagi para peneliti topik sejenis, penulis menyarankan dalam mengambil populasi agar mencari populasi yang tidak terlalu besar dalam penelitiannya. Hal tersebut dilakukan agar sampel yang didapat akan dapat lebih merepresentasikan laporan keuangan yang lebih nyata/riil. Selain itu juga populasi yang lebih kecil dapat lebih memudahkan para peneliti sejenis dalam melakukan perhitungan yang diperlukan.